

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintah demokrasi menurut al-Ghazali secara makna tentu tidak sejalan. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dijelaskan dalam makna demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Tentu hal tersebut sangat tidak sejalan dengan konsep sumber kekuasaan yang al-Ghazali utarakan yaitu kekuasaan tertinggi itu berada ditangan Tuhan atau dengan kata lain segala ketentuan yang menyangkut pengelolaan negara atau sistem pemerintahan harus berdasarkan legistimasi religius (Hukum-hukum Allah sebagai landasan utama).

Tetapi secara praktek atau implementasi konsep pemerintahan menurut al-Ghazali justru mengandung prinsip dan ciri dari demokrasi itu sendiri. politik ideal yang diinginkan al-Ghazali mencakup sifat amanah dan keadilan yang penguasa terapkan, rakyat taat pada pemerintahnya, dan musyawarah antara antara rakyat dan pemimpin negara terjalin harmonis. Hal tersebut sejalan dari segi prosedural dan organisatoris namun tidak secara filosofis. Yang kemudian terlihat dari tolak ukur keberhasilan demokrasi yang juga mengacu pada tiga hal penting seperti politik ideal menurut al-Ghazali yaitu: Peningkatan kualitas *responsiveness* dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

B. Rekomendasi

1. Sebagai negara yang mengusung konsep negara demokrasi, maka penguasa berkewajiban untuk memberikan kewenangan untuk rakyat agar bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan negara termasuk mengontrol dan mengawasi para penguasa dalam mengelola negara.
2. Pemerintah berkewajiban memberikan ruang untuk rakyat dan memfasilitasi mereka dalam pendidikan politik yang baik. Agar gagasan tentang masyarakat madani dapat terwujud, agar prasyarat menuju konsep demokrasi bisa terlaksana.
3. Para penguasa, wajib memahami tanggungjawabnya sebagai pelayan rakyat. Maka kepentingan rakyat menjadi prioritas dan landasan utama semasa ia berkuasa. kepentingan rakyat bukan hanya slogan tetapi tertanam di jiwa mereka dan terimplementasi pada tindakan penguasa.
4. Saran untuk para peneliti berikutnya yang juga ingin membahas permasalahan tentang etika politik. Maka bandingkanlah pemikiran para pemikir politik di era klasik dan modern agar mendapat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep di era klasik dan masa sekarang tentang etika politik. Misalnya seperti analisis perbandingan corak pemikiran politik Islam di masa Al-Mawardi dengan pemikir politik Islam di Indonesia agar terdapat kajian komparatif mengenai konsep etika di masa lampau dan di masa saat ini, agar terjadi

gagasan baru untuk para penguasa dalam menjalankan kehidupan politik.